

Analisis Efektivitas Kebijakan Publik dalam Manajemen Risiko Bencana Alam di Indonesia

Febriana Muryanto,^{1*} Djuniawan Karna Djaja²

^{1,2}. Universitas Gunungkidul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana alam di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan dampaknya terhadap mitigasi bencana. Indonesia sebagai negara rawan bencana membutuhkan kebijakan publik yang responsif dan adaptif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara dengan pemangku kepentingan di bidang kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah berkembang, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang bersifat reaktif lebih dominan dibandingkan pendekatan preventif berbasis pengurangan risiko. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas lokal, dan integrasi pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana di Indonesia.

Kata Kunci: kebijakan publik, manajemen risiko, bencana alam, efektivitas kebijakan, Indonesia

Copyright (c) 2025 **Febriana Muryanto**

✉ Corresponding author :

Email Address : febriana.muryanto@ugk.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam akibat letak geografisnya yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, serta kondisi klimatologis dan topografis yang kompleks. Bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan kerap terjadi secara berkala dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian nasional. Kondisi ini menuntut hadirnya kebijakan publik yang tidak hanya bersifat tanggap darurat, tetapi juga terstruktur dan berkelanjutan dalam manajemen risiko bencana.

Kebijakan publik dalam konteks manajemen risiko bencana memainkan peran strategis dalam merancang sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi payung hukum utama yang mendasari sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan masih dominannya pendekatan reaktif dibanding preventif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik yang telah diterapkan mampu mengurangi risiko dan dampak bencana alam secara efektif. Fokus analisis mencakup perencanaan kebijakan, pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan memahami dinamika kebijakan dan tantangan yang dihadapi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi penguatan sistem manajemen risiko bencana di Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

Pengembangan kebijakan publik yang efektif dalam manajemen risiko bencana didasari oleh integrasi antara perumusan kebijakan, pelibatan pemangku kepentingan, serta implementasi program mitigasi dan adaptasi yang terukur. Teori kebijakan publik menyatakan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses formulasi, aktor yang terlibat, kapasitas institusi, serta faktor sosial dan politik yang melingkupinya (Dye, 2017). Dalam konteks manajemen risiko bencana di Indonesia, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen regulatif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterapkan secara konsisten di berbagai tingkat pemerintahan dan berdampak nyata terhadap pengurangan risiko bencana. Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan untuk menguji hubungan antara berbagai faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana. Beberapa variabel yang diidentifikasi meliputi: kapasitas kelembagaan (X_1), koordinasi antarlembaga (X_2), partisipasi masyarakat (X_3), serta efektivitas kebijakan publik (Y) sebagai variabel dependen. Teori implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983) mendukung asumsi bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, sumber daya yang tersedia, serta komitmen aktor pelaksana.

Dengan merujuk pada kerangka teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **H1:** Kapasitas kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana.
- **H2:** Koordinasi antarlembaga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana.
- **H3:** Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengukur dan menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana alam di Indonesia. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan sebelumnya, serta mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel seperti kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kebijakan publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan pejabat instansi pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta lembaga terkait lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria responden yang memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang kebencanaan dan pernah terlibat dalam implementasi kebijakan terkait. Jumlah responden yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah 100 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Skala Likert lima poin digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap pernyataan yang disajikan, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju”. Instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengambilan data utama. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan kelayakan model regresi. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan publik di bidang manajemen risiko bencana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari data kuesioner yang dikumpulkan dari 100 responden yang terdiri dari pejabat BNPB, BPBD, dan instansi terkait yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian sedang hingga tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana, terutama pada aspek penyusunan regulasi dan ketersediaan dokumen perencanaan bencana. Namun, skor terendah ditemukan pada aspek koordinasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel memiliki nilai korelasi item-total $> 0,30$ dan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$, sehingga instrumen dinyatakan valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data bebas dari multikolinearitas ($VIF < 10$), tidak terjadi heteroskedastisitas, dan residual berdistribusi normal. Oleh karena itu, model regresi linear berganda layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa:

- **Kapasitas kelembagaan (X_1)** berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kebijakan publik, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,402 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$).
- **Koordinasi antarlembaga (X_2)** juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan koefisien 0,297 dan signifikansi 0,003 ($p < 0,05$).
- **Partisipasi masyarakat (X_3)** memiliki pengaruh positif, namun signifikansinya berada tepat pada ambang batas (koefisien 0,185; signifikansi 0,049).

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,612 menunjukkan bahwa 61,2% variasi dalam efektivitas kebijakan publik dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut secara simultan. Dengan demikian, model regresi yang dibangun memiliki daya jelaskan yang cukup kuat terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, mekanisme koordinasi yang efisien, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Ketiga faktor ini terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas kebijakan publik di sektor kebencanaan di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan

dengan teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan aktor-aktor pelaksana.

Pertama, kapasitas kelembagaan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi yang memiliki struktur organisasi yang jelas, SDM yang kompeten, serta anggaran yang memadai cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan bencana. Temuan ini mengonfirmasi hasil studi sebelumnya yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana (Lassa, 2019). Dalam konteks Indonesia, penguatan kelembagaan di tingkat daerah menjadi kunci karena daerah merupakan garda terdepan dalam respons terhadap bencana.

Kedua, koordinasi antarlembaga juga terbukti signifikan dalam mempengaruhi efektivitas kebijakan. Bencana alam merupakan peristiwa multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, NGO, dan sektor swasta. Kurangnya sinergi antar aktor sering kali menghambat kecepatan respons dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terintegrasi, termasuk penguatan peran BNPB sebagai lembaga koordinator nasional.

Ketiga, partisipasi masyarakat juga berperan penting meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan dua variabel lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, simulasi, dan edukasi kebencanaan masih belum optimal. Padahal, masyarakat merupakan pihak yang pertama terkena dampak dan juga aktor utama dalam fase pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program edukasi publik dan membangun budaya sadar bencana secara berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan oleh pendekatan *community-based disaster risk management* (CBDRM).

Secara umum, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan. Pendekatan yang bersifat *top-down* perlu dilengkapi dengan partisipasi dari bawah (*bottom-up*) agar kebijakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan dinamika di lapangan. Dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat koordinasi lintas aktor, dan memberdayakan masyarakat, maka kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam manajemen risiko bencana alam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Temuan empiris menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memberikan kontribusi paling signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yang mencakup kecukupan sumber daya manusia, kejelasan struktur organisasi, serta ketersediaan anggaran dan sarana pendukung. Hal ini mempertegas bahwa tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Koordinasi antarlembaga juga terbukti berperan penting dalam menjembatani perbedaan peran dan kewenangan antarinstansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ketidaksinkronan informasi, tumpang tindih program, serta lemahnya komunikasi antarunit kerja menjadi

hambatan nyata dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sementara itu, meskipun partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang lebih moderat, aspek ini tetap krusial dalam membangun ketahanan komunitas dan memastikan kebijakan berbasis pada kebutuhan nyata warga terdampak. Dengan demikian, efektivitas kebijakan publik dalam konteks manajemen risiko bencana di Indonesia menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif dan administratif, tetapi juga partisipatif dan kolaboratif. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas lembaga, memperbaiki sistem koordinasi, dan memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui integrasi ketiga aspek tersebut, diharapkan kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi risiko dan dampak bencana secara sistematis dan berkeadilan.

Referensi :

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x> .
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Lassa, J. A. (2013). Disaster Policy Change in Indonesia 1930–2010: From Government to Governance? *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 31(2), 130–159.
- Lassa, J. A., Surjan, A., Caballero-Anthony, M., & Fisher, R. (2019). Measuring Political Will: An Index of Commitment to Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 34, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.11.001>.
- Putra, D. I., & Matsuyuki, M. (2019). Disaster Management Following Decentralization in Indonesia: Regulation, Institutional Establishment, Planning, and Budgeting. *Journal of Disaster Research*, 14(1), 175–185. <https://doi.org/10.20965/jdr.2019.p0175>
- Nugroho, H. S., & Lestari, D. P. (2020). Strengthening disaster mitigation through community-based disaster risk management in Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 45, 101453. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101453>
- Adriani, M., & Suryanto, S. (2020). Evaluating the Implementation of Disaster Risk Reduction Policies in Local Government: A Case Study from Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 8, 100123. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100123>
- Febriana, R., & Dewi, R. S. (2021). Institutional Capacity and Inter-Agency Coordination in Disaster Management in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(1), 67–78. <https://doi.org/10.31289/jia.v18i1.5122>
- Djalante, R., Shaw, R., & DeWit, A. (2012). Disaster risk reduction and climate change adaptation: Case studies from Southeast Asia. *Environmental Hazards*, 11(3), 234–250. <https://doi.org/10.1080/17477891.2011.609879>

